

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON FAIR VALUE ASSET MEASUREMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUKURAN NILAI WAJAR ASET PADA LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

Handitha Krisna Murti¹, Cahyani Nuswandari²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang^{1,2}
handithakrisna7012@mhs.unisbank.ac.id¹, cahyani@edu.unisbank.ac.id²

ABSTRACT

Fair value measurement of financial assets is a critical aspect for financial institutions, as the fair value reflects the estimated worth of a company's assets, thereby influencing the company's overall value. This study aims to examine the influence of corporate governance (GCG) described as independent variables used includes the independence of the board commissioners, the competence of the audit committee, managerial ownership, and institutional ownership on decision-making regarding the fair value measurements of level 3 assets as dependent variables. The research employs a quantitative approach using secondary data analyzed through multiple regression analysis. The sample consists of the population of financial institutions listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from the year of 2019-2023 that has been published the annual report that shows the fair value level 3 of assets. The findings indicate that the independence of the board commissioners has a negative but insignificant effect on fair value measurement of level 3 assets. While the competence of the audit committee, managerial ownership, and institutional ownership have a significant negative impact on fair value measurement of level 3 assets in financial institutions.

Keywords: *Fair Value Measurement Of Level 3 Assets, Independence Of The Board Of Commissioners, Competence Of The Audit Committee, Managerial Ownership, Institutional Ownership*

ABSTRAK

Pengukuran nilai wajar aset keuangan menjadi sebuah aspek yang krusial pada lembaga keuangan karena besaran nilai wajar aset mencerminkan estimasi nilai aset perusahaan sehingga memengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan (GCG) yang digambarkan melalui variabel independen yang digunakan adalah independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional dalam pengambilan keputusan terhadap pengukuran nilai wajar aset level 3 sebagai variabel dependen. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis regresi berganda. Sampel berupa populasi lembaga keuangan yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu tahun 2019-2023 dengan kriteria perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang menunjukkan nilai wajar aset level 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengukuran nilai wajar aset level 3. Sedangkan kompetensi komite audit, kepemilikan manajerial serta kepemilikan institusional berdampak negatif signifikan terhadap pengukuran nilai wajar aset level 3 pada lembaga keuangan.

Kata kunci: Pengukuran Nilai Wajar Aset Level 3, Independensi Dewan Komisaris, Kompetensi Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional

PENDAHULUAN

Pengukuran nilai wajar aset (*fair value measurement*) menjadi aspek krusial dalam pelaporan keuangan lembaga keuangan, karena nilai wajar mencerminkan estimasi nilai aset atau liabilitas berdasarkan kondisi pasar saat ini. Pengukuran ini tidak hanya memengaruhi laporan keuangan, tetapi juga keputusan investasi, manajemen

risiko, dan kepercayaan stakeholders (Abouarram, 2024).

Dalam konteks perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik diyakini dapat memengaruhi kualitas pengukuran nilai wajar aset. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa proses pengukuran nilai wajar dilakukan secara objektif, akurat, dan bebas dari manipulasi.

Beberapa kasus kegagalan perbankan di Indonesia, seperti contohnya kasus Bank Century, menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan dapat berdampak pada ketidakakuratan pengukuran nilai aset, yang pada akhirnya mengarah pada kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana tata kelola perusahaan memengaruhi pengukuran nilai wajar aset pada perbankan di Indonesia (Prasetyo, 2009).

PSAK No. 113 membagi pengukuran nilai wajar untuk aset dan liabilitas ke dalam tiga level kategori hirarki nilai wajar. Pada PSAK tersebut mengatur pengukuran nilai wajar yang digolongkan ke dalam 3 (tiga) level. Ketiga level tersebut diurutkan dengan memberikan prioritas tertinggi pada data yang paling andal dan langsung tersedia di level 1 dan prioritas terendah untuk data yang paling subjektif dan tidak dapat diobservasi langsung di level 3 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

Berdasarkan PSAK 113, hirarki input penilaian nilai wajar dibagi menjadi 3 level yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Input nilai wajar Level 1 merupakan input data yang paling dapat diandalkan karena menggunakan harga kuotasi langsung atau tanpa penyesuaian dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang serupa. Harga ini dianggap sebagai bukti paling andal untuk menentukan nilai wajar dan umumnya digunakan tanpa penyesuaian.
- b. Input nilai wajar Level 2 mencakup input data selain dari harga kuotasi pada input nilai wajar Level 1 yang dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung, meskipun tidak seandal Input nilai wajar Level 1. Data ini meliputi harga kuotasi untuk aset atau liabilitas serupa di pasar

yang aktif dan tidak aktif, tingkat suku bunga, volatilitas tersirat, atau informasi lain yang diperkuat oleh data pasar.

- c. Sementara itu, input Level 3 merupakan input yang tidak dapat diobservasi langsung dan digunakan ketika tidak ada aktivitas pasar yang relevan untuk aset atau liabilitas yang dinilai. Input ini bersifat lebih subjektif dan sering kali melibatkan penggunaan data internal entitas atau model penilaian yang kompleks. Input ini juga mencerminkan asumsi oleh pelaku pasar dalam menentukan harga aset atau liabilitas serta asumsi mengenai risiko.

Teori Keagenan

Tarigan (2022) menyatakan bahwa teori keagenan menjelaskan tentang adanya hubungan yang terdiri dari dua pihak dalam suatu perusahaan di mana satu pihak berperan sebagai agen (penerima kontrak) dan pihak lainnya sebagai principal (pemberi kontrak). Teori keagenan dapat menjelaskan tentang latar belakang atau penyebab terjadinya peristiwa kecurangan pada suatu perusahaan. Selain itu, teori ini juga dapat membantu untuk mempelajari konflik kepentingan dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara agen dan principal.

Pemisahan yang jelas antara prinsipal dan agen, memungkinkan suatu permasalahan yang disebut konflik keagenan yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak tersebut. Konflik keagenan terjadi karena adanya kecenderungan manajemen untuk melakukan *moral hazard* (Lusiana, 2014). Alijoyo & Zaini (2004) dalam Azwari (2016) menyatakan bahwa konflik keagenan timbul karena manajemen sebagai agen berkeinginan untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan hasil dengan

mengorbankan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal.

Nilai Wajar (*Fair Value*)

Nilai wajar atau *fair value* merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan nilai suatu aset berdasarkan harga pasar yang adil dan objektif pada saat tertentu. Implementasi pengukuran *fair value* dalam pelaporan keuangan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang penting dalam beberapa tahun terakhir (Brata, Hasibuan, & Sembiring, 2023).

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) atau yang bisa disebut tata kelola perusahaan yang baik menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara adalah suatu metode dalam mengelola perusahaan dengan menerapkan 5 (lima) prinsip utama meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*), yaitu proses pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul karena adanya perjanjian secara adil dan setara sesuai ketentuan perundang-undangan. Variabel utama yang digunakan untuk mewakili penilaian GCG antara lain independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan insititusional.

Dewan Komisaris Independen (*Independent Commissioner*)

Dewan komisaris merupakan bagian penting dalam perusahaan. Dewan komisaris harus memiliki keahlian dan integritas untuk memenuhi kepentingan para pemangku

kepentingan. Selain itu dewan komisaris juga harus dapat berperan sebagai mediator dalam mengatasi perselisihan antar manajemen internal. (Margaret & Maljono, 2023). Intia & Azizah (2021) mengungkapkan pada penelitiannya bahwa komisaris independen merupakan pengawas selayaknya komisaris tetapi tidak memiliki hubungan dekat dengan pemegang saham yang mempunyai wewenang untuk melindungi dan mengawasi pemegang saham minoritas. Komisaris independen juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan suatu perusahaan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi serta memberi masukan dan saran kepada direksi supaya tujuan perusahaan dapat tercapai (Nugraheni, 2023).

Komite Audit (*Audit Committee*)

Bedasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03./2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum bahwa komite audit dibentuk dari anggota yang terdiri dari paling sedikit satu orang komisaris independen, satu orang pihak independen yang ahli dibidang keuangan atau akuntansi, dan satu orang pihak independen yang ahli dibidang hukum atau lembaga keuangan. Tugas komite audit adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite audit selalu diekspektasikan dapat membantu pengurus, terutama dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan, salah satunya yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen (Mulianita, Sutarti, & Triandi, 2019).

Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*)

Suwisma et al (2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial menunjukkan kondisi di mana manajer perusahaan merangkap jabatan sebagai manajemen perusahaan sekaligus pemegang saham. Jaminan yang diberikan kepemilikan manajerial bahwa untuk sehingga menghalangi perilaku oportunistik manajer, manajemen akan menyesuaikan kepentingannya dengan pemegang saham lain dalam memantau dan mengelola perusahaan (Sianturi, Syarif, & Wahyudi, 2017). Keterlibatan manajemen pada kepemilikan tersebut akan menjadi motivasi bagi manajemen agar bertindak secara hati-hati dalam mengambil keputusan karena dalam hal ini manajemen perlu menyadari konsekuensi dari setiap keputusan yang mereka ambil (Margaret & Maljono, 2023).

Kepemilikan Institusional (*Institution Ownership*)

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan baik oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, maupun dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan (Dewi & Subardjo, 2020). Cara untuk mengurangi konflik antar manajer dengan para pemegang saham perusahaan dapat dilakukan salah satunya melalui kepemilikan institusional. Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan institusional yang besar dapat mengindikasikan kemampuan mengawasi manajemen yang semakin baik, sehingga semakin besar kepemilikan institusional, maka pemanfaatan aset perusahaan semakin efisien. Efisiensi pemanfaatan aset ini yang

diharapkan mampu bertindak sebagai pencegahan perilaku pemborosan oleh manajemen (Suwisma, Rais, M. Haykal, & Razif, 2023).

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris (*Independent Commissioner*) terhadap Pengukuran Nilai Wajar Aset

Dewan komisaris dianggap independen apabila tidak memiliki hubungan pribadi maupun hubungan bisnis baik dengan direksi maupun dengan perusahaannya yang dapat menimbulkan potensi adanya benturan kepentingan. Dewan komisaris independen memiliki peran dan tanggung jawab utamanya untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi, memantau pelaksanaan bisnis, serta mewakili kepentingan para pemegang saham perusahaan (Abidin & Prabantarikso, 2021). Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa konflik agensi dapat dicegah atau dikurangi dengan pengawasan dewan komisaris yang bersifat independen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2023) menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap input nilai wajar level 3. Semakin tinggi independensi dewan komisaris, maka semakin rendah input nilai wajar di level 3. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengukuran nilai wajar level 3.

Pengaruh Komite Audit (*Audit Committee*) terhadap Pengukuran Nilai Wajar

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan dipimpin oleh komisaris independen dan

beranggotakan komisaris independen lainnya dan pihak individu independen profesional lain di luar perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit perusahaan maka semakin tinggi pengawasan terhadap perusahaan terutama laporan keuangan perusahaan. Komite audit dapat diukur dengan menilai dari beberapa karakteristik, salah satunya dengan melihat latar belakang pendidikan dari komite audit tersebut (Pamudji & Trihartati, 21–29). Komite audit yang berkompeten di bidangnya dapat menambah kepercayaan para investor terhadap laporan keuangan perusahaan serta meminimalisir pelanggaran tata kelola (Lawrence, Muda, & Susan, 2000).

Penelitian yang dilakukan Linggar Yekti Nugraheni (2023) bahwa semakin banyak jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan, maka semakin sedikit jumlah instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar level 3. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap pengukuran nilai wajar level 3.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*) terhadap Pengukuran Nilai Wajar

Kepemilikan manajerial dihitung menggunakan persentase antara kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial dibandingkan dengan total saham yang beredar. Jika manajemen memiliki saham perusahaan, terdapat potensi kepentingan yang dapat mendorong perilaku oportunistik manajemen dalam pengukuran nilai wajar aset perusahaan. Suwisma dkk (2023) beranggapan bahwa kepemilikan manajerial mampu untuk mengurangi

konflik yang timbul antara manajer dengan para pemegang saham.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mwapula (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap input nilai wajar level 2 dan 3. Dari uraian tersebut disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap pengukuran nilai wajar level 3

Pengaruh Kepemilikan Institusional (*Intitutional Ownership*) terhadap Pengukuran Nilai Wajar

Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan oleh investor perusahaan yang dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer (Herdjiono & Sari, 2017). Investor yang berperan sebagai prinsipal cenderung ikut campur dalam pengambilan keputusan oleh manajemen sebagai agen termasuk dalam hal input nilai wajar aset level 3. Nugraheni (2023) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pula unput nilai wajar level 3 aset perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan perilaku oportunistik dari investor institusional yang ingin mengambil keuntungan dengan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik.

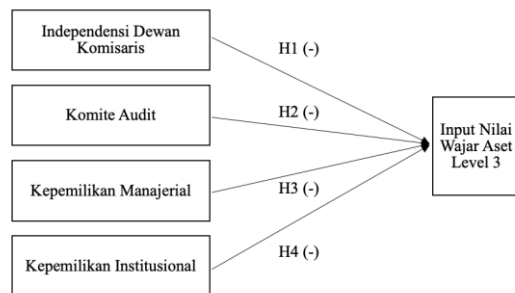
Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi nilai wajar input level 3 diatas maka, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengukuran nilai wajar.

Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah model kuantitatif yang

menggunakan analisis statistik untuk menguji hubungan antar variabel secara objektif. Model penelitian dimaksud digambarkan dengan bagan berikut ini :



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi berupa lembaga keuangan di Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018 sampai tahun 2023. Pengambilan sampel dengan *purposive* yaitu seluruh lembaga keuangan di Indonesia dengan kriteria lembaga keuangan yang terdaftar di BEI dengan data yang diambil merupakan data dari laporan keuangan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria lembaga keuangan antara lain lembaga keuangan yang sudah menerbitkan laporan tahunan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, menunjukkan pengukuran nilai wajar aset pada level 3, mencantumkan profil pengurus lembaga keuangan, serta data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Bedasarkan kriteria tersebut, didapatkan data populasi sebanyak 210 data dengan data sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 118 data yang digunakan dalam pengujian menggunakan metode regresi linier berganda.

Pengukuran Variabel

Independensi Dewan Komiasris (IC)

Menurut Nugraheni (2023) berdasarkan pernyataan Giovani (2019) bahwa independensi Dewan Komisaris dalam penelitian ini dihitung dari proporsi jumlah komisaris independen dibandingkan dengan seluruh jumlah dewan komisaris. Sehingga rumus untuk menghitung independensi dewan komisaris menggunakan rumus berikut:

$$IC = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Kompetensi Komite Audit (ACS)

Kompetensi komite audit dalam penelitian ini dihitung berdasarkan jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, keuangan, perbankan, dan hukum. Menurut Sari & Husaini (2016) ukuran kompetensi komite audit suatu perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$IC = \frac{\text{Jumlah Komite audit berkompetensi}}{\text{Jumlah Komite Audit}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial (MO)

Menurut Dewi & Sanica (2017) bahwa dalam mengukur kepemilikan manajerial dapat diukur dengan perbandingan jumlah kepemilikan saham oleh manajerial perusahaan dibandingkan dengan *outstanding* atau jumlah saham seluruh perusahaan yang beredar. Sehingga rumus untuk perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$MC = \frac{\text{Kepemilikan saham manajerial}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Intitusional (IO)

Pengukuran kepemilikan institusional dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung jumlah kepemilikan lembar saham yang dimiliki

oleh institusi dibanding jumlah saham beredar (Dewi & Sanica, 2017). Sehingga kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut:

$$IO = \frac{\text{Kepemilikan saham institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan aplikasi *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Uji yang dilakukan terhadap data yang diperoleh yaitu dengan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, pengujian model, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari uji 5050tastic deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
IC	118	0,33	0,8	0,5316	0,10921
ACS	118	0	1	0,5896	0,24129
MO	118	0	0,65	0,0232	0,0966
IO	118	0,41	0,97	0,738	0,16512
FVM	118	0	0,99	0,3495	0,37904

Catatan: Pengukuran Nilai Wajar (FVM), Independensi Dewan Komisaris (IC), Komite Audit (AC), Kepemilikan Manajerial (MO), Kepemilikan Institusional (IO).

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1 diatas, , diketahui bahwa :

Variabel dependen berupa pengukuran nilai wajar aset level 3 (FVM) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3495 , nilai minimum 0 dan nilai maximum 0,99 dengan standar deviasi sebesar 0,37904.

Variabel independen berupa independensi dewan komisaris (IC) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5316, nilai minimum 0,33 dan nilai maximum 0,8 dengan standar deviasi sebesar 0,10921

Variabel independen berupa Kompetensi Komite audit (ACS) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5896, nilai minimum 0 dan nilai maximum 1 dengan standar deviasi sebesar 0,24129.

Variabel independen berupa kepemilikan manajerial (MO) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0232, nilai minimum 0 dan nilai maximum 0,65 dengan standar deviasi sebesar 0,0966.

Variabel independen berupa kepemilikan institusional (IO) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,738, nilai minimum 0,41 dan nilai maximum 0,97 dengan standar deviasi sebesar 0,16512.

Semua variabel memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga data tersebut bersifat homogen dan representatif.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil uji Skewness Kurtosis

	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	0,416	0,223	-0,684	0,442

Nilai dari skewness dan kurtosis didapat dari rumus berikut:

$$\text{skewness kurtosis} = \frac{\text{Statistik Skewness atau Statistik Kurtosis}}{\text{Std. Error Skewness atau Std Error Kurtosis}}$$

Nilai skewness sebesar 1,865470852 sehingga angka tersebut masih berada diantara $\pm 1,96$ sehingga dapat diartikan hasil dari uji skewness menunjukkan data residual pada model regresi berdistribusi normal.

Nilai kurtosis sebesar -1,547511312 sehingga angka tersebut masih berada diantara $\pm 1,96$ sehingga dapat diartikan hasil dari uji kurtosis menunjukkan data residual pada model regresi berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis apakah persamaan model regresi dapat diterima dengan cara melakukan uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan

autokorelasi (Purba, Tarigan, Sinaga, & Tarigan, 2021).

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF
IC	0,881	1,135
ACS	0,92	1,086
MO	0,915	1,093
IO	0,942	1,061

Keterangan :

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
IC	0,001	0,161	0,001	0,007	0,994
ACS	-0,126	0,071	-0,17	-1,763	0,081
MO	-0,155	0,178	-0,084	-0,867	0,388
IO	-0,031	0,103	-0,029	-0,306	0,76

Keterangan :

Independensi Dewan Komisaris (IC), Kompetensi Komite Audit (ACS), Kepemilikan Manajerial (MO), Kepemilikan Institusional (IO)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 3 diatas,

Independensi Dewan Komisaris (IC), Kompetensi Komite Audit (ACS), Kepemilikan Manajerial (MO), Kepemilikan Institusional (IO)

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas diatas kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh hasil uji multikolinearitas tersebut adalah semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,01 dan nilai (*variance inflation factor*) VIF kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

seluruh variabel memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data variabel independen pada uji tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.513a	0,263	0,237	0,33118	1,882
dL	1,6303			
dU	1,7702			
dW	1,882			
4-dU	2,2298			

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson sebagaimana tabel 4 diatas dengan kriteria $dU < \text{dhitung} < 4-dU$, maka diperoleh hasil $1,7651 < 2,037 < 2,2349$, sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen.

Pengujian Model

Pengujian model adalah langkah yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik model statistik yang digunakan sesuai dengan data yang ingin

diamati. Pengujian ini melibatkan serangkaian uji untuk memeriksa apakah kondisi-kondisi statistik yang mendasari metode estimasi terpenuhi.

Uji F (Uji Kelayakan Model)

Tabel 6. Hasil Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4,416	4	1,104	10,065	.000
Residual	12,394	113	0,11		
Total	16,81	117			

Hasil uji F pada tabel _ tersebut menunjukkan hasil sig. 0,00 sehingga signifikansi $< 0,05$. Model regresi sudah fit, variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

	R	Adjusted R
R	Square	Square

.513a 0,263 0,237

Bedasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel _ diatas, Nilai R Square sebesar 0.237 (23.7%) mengindikasikan bahwa 23.7% variasi dalam pengukuran nilai wajar dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel independen (IC, ACS, MO, IO). Sisanya, sebesar 76.3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

Pengujian Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,978	0,224		4,367	0
IC	0,478	0,299	0,138	1,6	0,112
ACS	-0,443	0,132	-0,282	-3,351	0,001
MO	-0,979	0,331	-0,25	-2,954	0,004
IO	-0,811	0,191	-0,353	-4,248	0

Keterangan :

Independensi Dewan Komisaris (IC), Kompetensi Komite Audit (ACS), Kepemilikan Manajerial (MO), Kepemilikan Institusional (IO)

Independensi Dewan Komisaris (IC) memiliki koefisien negatif (-0.223) tetapi tidak signifikan ($p = 0.483 > 0.05$) sehingga **H1 ditolak**.

Variabel independen Kompetensi Komite Audit (ACS) memiliki koefisien negatif (-0.522) dan signifikan ($p = 0.008$) sehingga **H2 diterima**. Arah

Uji T

Bedasarkan tabel __, dapat disimpulkan bahwa variabel independen

negatif mungkin menunjukkan ketidaksesuaian kriteria kompetensi.

Variabel independen Kepemilikan Manajerial(MO) memiliki koefisien negatif kuat (-1.312) dan sangat signifikan ($p = 0.000$). sehingga **H3 diterima**. Peningkatan kepemilikan saham oleh manajemen berhubungan dengan penurunan signifikan variabel dependen.

Kepemilikan Institusional (IO) memiliki koefisien negatif (-0.849) dan sangat signifikan ($p = 0.000$) sehingga **H4 ditolak**. Kepemilikan oleh institusi seperti perusahaan atau bank dikaitkan dengan penurunan variabel dependen.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model persamaan:

$$FVM = \alpha + \beta_1 IC + \beta_2 AC + \beta_3 MO + \beta_4 IO + e$$

Berdasarkan tabel 4, persamaan regresi dari model riset ini sebagai berikut:

$$FMV = 0,978 + 0,478X_1 - 0,443X_2 - 0,979X_3 - 0,811X_4 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Pengukuran Nilai Wajar Aset Level 3

Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengukuran nilai wajar aset level 3. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap input nilai wajar level 3. Semakin tinggi independensi dewan komisaris, maka semakin rendah input nilai wajar di level 3 (Nugraheni, 2023). Namun hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa independensi dewan komisaris yang semakin tinggi akan semakin berpengaruh positif terhadap prudence

atau kebijakan akuntansi suatu perusahaan (Saragih & Rohman, 2019).

Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Pengukuran Nilai Wajar Aset Level 3

Kompetensi komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengukuran nilai wajar aset level 3. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa Semakin banyak jumlah komite audit perusahaan maka semakin tinggi pengawasan terhadap perusahaan terutama laporan keuangan perusahaan (Pamudji & Trihartati, 21–29). Komite audit yang berkompeten di bidangnya dapat menambah kepercayaan para investor terhadap laporan keuangan perusahaan serta meminimalisir pelanggaran tata kelola (Lawrence, Muda, & Susan, 2000).

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengukuran Nilai Wajar Aset Level 3

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif paling kuat dibanding variabel independen lain terhadap pengukuran nilai wajar aset level 3. Hasil ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian terdahulu dengan hasil yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap input nilai wajar aset level 3 (Mwapula, 2016). Kepemilikan manajerial mampu untuk mengurangi konflik yang timbul antara manajer dengan para pemegang saham (Suwisma, Rais, M. Haykal, & Razif, 2023).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengukuran Nilai Wajar Aset Level 3

Kepemilikan institusional juga berpengaruh negatif dan signifikan, meskipun tidak sekuat variabel kepemilikan manajerial dalam

memengaruhi pengukuran nilai wajar aset level 3. Hasil pengujian pada penelitian ini tidak relevan dengan hasil riset yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pula unput nilai wajar level 3 aset perusahaan (Nugraheni, 2023). Penelitian ini tidak membuktikan adanya perilaku oportunistik dari kepemilikan institusional yang ingin mengambil keuntungan dengan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan institusional yang besar dapat mengindikasikan kemampuan mengawasi manajemen yang semakin baik, sehingga semakin besar kepemilikan institusional, maka pemanfaatan aset perusahaan semakin efisien (Suwisma, Rais, M. Haykal, & Razif, 2023).

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan bagaimana GCG yang dalam penelitian ini diwakilkan oleh variabel independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional dalam memengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan pengukuran nilai wajar aset level 3. Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan diatas, disimpulkan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengukuran nilai wajar aset level 3. Kompetensi komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan intitusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar aset level 3.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan factor tata kelola perusahaan seperti kompetensi komite

audit dan kepemilikan manajerial dan kepemilikan intitusional memiliki peran penting dalam memengaruhi pengukuran nilai wajar aset level 3, sementara independensi dewan komisaris tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi regulator dan praktisi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan khususnya terkait aset dengan nilai wajar level 3 yang memiliki tingkat subjektivitas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abouarram, S. (2024, May 26). *Fair Value Measurement: A Key to Reliable Financial Reporting*. Retrieved from Andersen Global: <https://eg.andersen.com/fair-value-measurement/>
- Prasetyo, A. H. (2009). Tiga Dosa Besar Bank Century. *Tiga Dosa Besar Bank Century*. Indonesia: Kontan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *SAK Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Tarigan, T. F. (2022). *Pengaruh Skeptisisme Profesional, Profesionalisme, dan Pengalaman terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lusiana, L. (2014). *Analisis Komparatif Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan dengan Kepemilikan dan Tanpa Kepemilikan Manajerial*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Azwari, P. C. (2016). Masalah Keagenan Pada Struktur Kepemilikan Perusahaan Keluarga Di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 173 - 184.

- Brata, M., Hasibuan, R., & Sembiring, R. (2023). Implementasi Pengukuran Nilai Wajar pada Pelaporan Keuangan di Indonesia. *ULILALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Margaret, E., & Maljono. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-14.
- Intia, L., & Azizah, S. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JRKA Volume 7 Issue 2*, 46-59.
- Nugraheni, B. L. (2023). The Impact of Corporate Governance Mechanism on Fair Value Measurement in the Indonesian Banking and Financial Industries. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 10 (2)*, 163 – 180.
- Mulianita, A., Sutarti, & Triandi. (2019). Pengaruh Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang Terdaftar Di Bank Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 7 No. 1*, 219 -223.
- Suwisma, Rais, R., M. Haykal, & Razif. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*.
- Sianturi, J., Syarif, D., & Wahyudi, S. (2017). Managerial Opportunistic Behavior and Overvalued Equity: The Role of Managerial Ownership and Dividend Policy. *International Conference on Management Sciences (ICoMS)*, 15–23.
- Dewi, S. Y., & Subardjo, A. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Abidin, Z., & Prabantariko, D. (2021). *Konsep dan Penerapan GCG pada Lembaga Keuangan dan BUMN*. Sleman: Deepublish.
- Pamudji, S., & Trihartati, A. (21–29). Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(1), 2012.
- Lawrence, J., Muda, P., & Susan, P. (2000). Pengaruh Aktivitas dan Independensi Komite Audit terhadap Corporate Fraud. *Jurnal Keuangan Manajerial*, 26(11).
- Mwapula, S. M. (2016). The Relationship Between Corporate Governance And Fair Value Accounting: The Case Of Commercial Banks Listed On The Nairobi Securities Exchange.
- Herdjiono, I., & Sari, I. (2017). The Effect of Corporate Governance on the Performance of a Company. Some Empirical Findings from Indonesia. *Journal of Management and Business Administration. Central Europe*, 33–52.
- Sari, M., & Husaini. (2016). Karakteristik Komite Audit, Struktur Kepemilikan dan Financial Distress. *Jurnal Fairness*, 6(1), 59–70.
- Dewi, K., & Sanica, I. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1).

Purba, D. S., Tarigan, W. J., Sinaga, M.,
& Tarigan, V. (2021). Pelatihan
Penggunaan Software SPSS
Dalam Pengolahan Regressi
Linear Berganda Untuk
Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Simalungun Di Masa
Pandemi Covid 19. *Jurnal Karya
Abadi*.